

RENCANA KERJA (RENJA INDUK)

TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PRABUMULIH**

Disusun oleh :
Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dishub 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan (Renja) Dinas Perhubungan Kota Prabumulih merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rancangan (Renja) merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik yang berjangka waktu tiga tahun. Rancangan (Renja) memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja kegiatan berupa input, output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Dokumen Rancangan (Renja) merupakan suatu jembatan yang akan menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Harapan kami semoga Rancangan (Renja) ini dapat berguna bagi kita semua untuk berbuat yang terbaik dalam memajukan kota Prabumulih

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua amin.

Prabumulih, Februari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Prabumulih,



Drs. AMILTON
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 196610051995031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra PD	8
Tabel 2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target	
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.....	8
Tabel 2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya	
atau melebihi target kinerja program / kegiatan 19.....	8
Tabel 2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian	
program Renstra Perangkat Daerah.....	9
Tabel 2.1.4 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran	
yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.....	9
 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
2.5. Review Terhadap Rancangan RKPD	34
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	41

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	48
3.3. Program dan Kegiatan	51
3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan	51
3.3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Program dan Kegiatan	57
3.3.3. Tabel Rencana Program dan Kegiatan	58
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2025.....	62
BAB V. PENUTUP	66

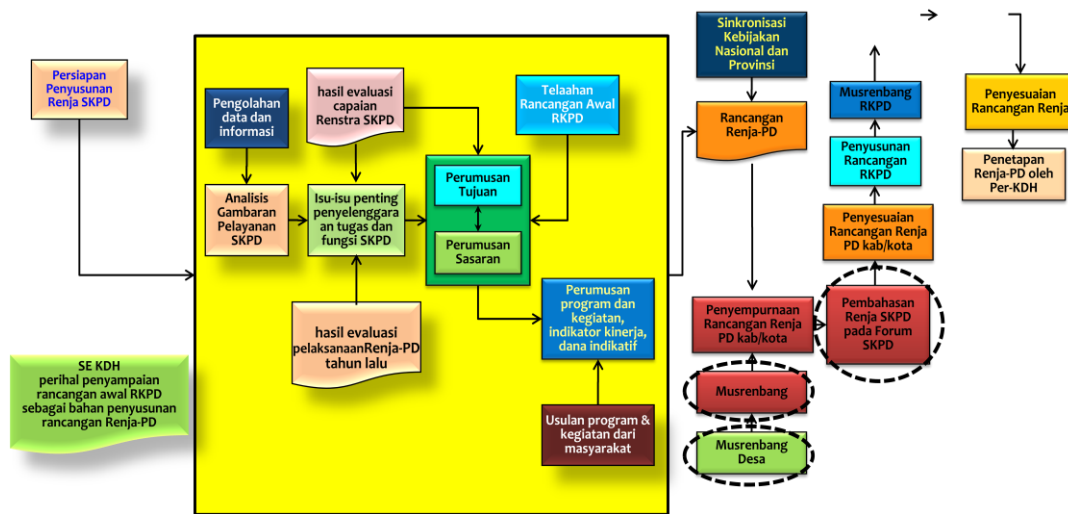


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu disusun Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih tahun 2025. Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis tiga tahunan. Berdasarkan pasal 1 point 30 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih merupakan suatu langkah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dalam satu tahun kedepan yang telah di tuangkan dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu Tahap persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Penyusunan forum PD/lintas PD; Perumusan rancangan akhir dan penetapan. PD menyusun rancangan Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi pada Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi renja PD tahun berjalan.



Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja PD

Renja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih disusun dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota **“MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK”** sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Prabumulih Periode Tahun 2024 – 2026, khususnya pada Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Sasaran ke-1 “Meningkatnya Maturitas SPIP Kota Prabumulih”
 - Indikator Kinerja “Nilai SPIP Kota Prabumulih”
- 2) Sasaran ke- 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”
 - Indikator Kinerja “ Nilai Evaluasi LAKIP Inspektorat”
- 3) Sasaran ke-3 “Meningkatnya nilai Indeks Pelayanan Masyarakat”
 - Indikator Kinerja “Survey Kepuasan Masyarakat”

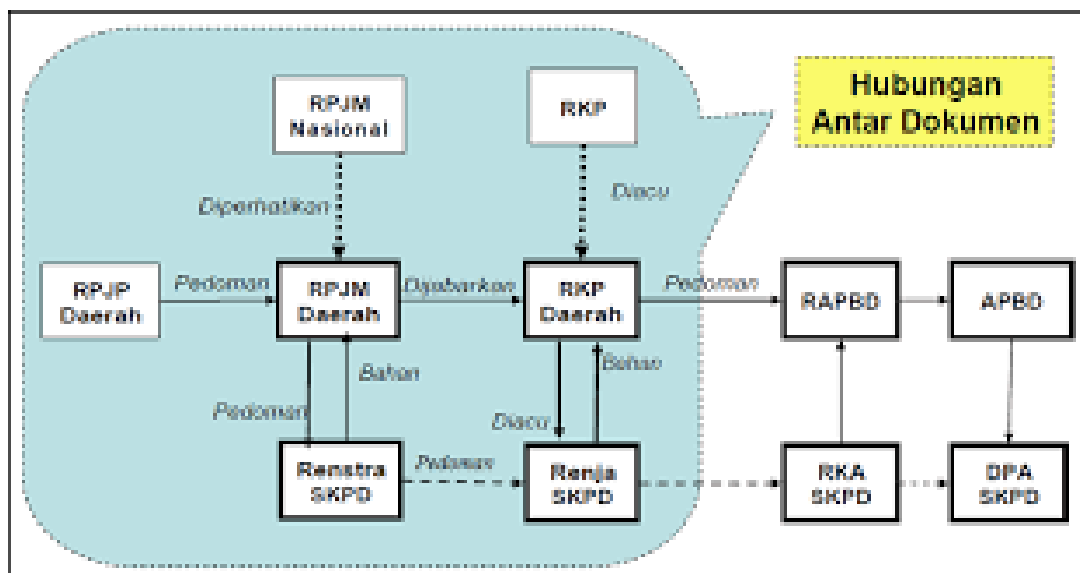
Rumusan, Tujuan dan sasaran Program RPD Dinas Perhubungan Kota Prabumulih adalah:

- 1) Program ke-1 “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “
 - Indikator Ke-1 “Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja”
 - Indikator Ke-2 “Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”
- 2) Program ke-2 “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).”
 - Indikator Ke-1 “Persentase Juru Parkir Yang Memiliki Izin”
 - Indikator Ke-2 “Persentase Kepemilikan KIR Terhadap Rencana KIR Angkutan Darat”

- Indikator Ke-3 “Persentase Layanan Angkutan Darat”

- Indikator Ke-4 “Persentase Sarana Prasarana Rambu Lalu Lintas yang Terpenuhi”

Selain itu Renja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Dari berbagai isu-isu strategis yang terdapat dihadapi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kendaraan dengan segala jenisnya yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur;
2. Belum optimalnya Manajemen Transportasi/Kemacetan;
3. Angkutan umum yang belum sepenuhnya mampu memperlancar aktivitas masyarakat dikarenakan kalah dengan moda lain;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pada peraturan di bidang perhubungan;



5. Belum terealisasinya pengadaan terminal dalam kota yang representatif dan terminal terpadu;
6. Belum optimalnya penataan lingkungan perkotaan;
7. Belum optimalnya pelayanan Dinas Perhubungan , berkaitan dengan pelayanan penyediaan sarana prasarana transportasi dan pelayanan perhubungan lainnya;
8. Kualitas aparatur Dinas Perhubungan yang masih perlu ditingkatkan, baik jumlah maupun kompetensinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk memiliki Rancangan Renja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 tahun 2003. Tentang pembagian organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan panjang Nasional tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyampaian Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;



10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Keputusan kepala dinas perhubungan kota prabumulih nomor : 019/KPTS/DISHUB/2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2024 - 2026
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) Nomor 050 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2024 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran.

Adapun Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih adalah :



1. Pemerintahan yang baik, berkualitas dan berprestasi, baik dari sisi pelaksanaan pemerintahannya maupun dari sisi pelayanan terhadap Masyarakat
2. Infrastruktur yang cukup, memadai, baik, dan berkualitas, yang mampu melampaui standar kebutuhan dasar hidup masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Kota Prabumulih

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penyusunan Rancangan Renja PD Dinas Perhubungan, Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang berisikan tentang pengertian dan proses penulisan serta Keterkaitan penyusunan Rancangan Renja PD dengan Dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Bab ini memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

- 2.1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
- 2.2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
- 2.3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.



- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- 2.6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
 - 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan
 - 3.3.2. Uraian garis besar mengenai rekafitulasi program dan kegiatan
 - 3.3.3. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Pada ini mengevaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2023 dan 2024 dan perkiraan capaian Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 yang mengacu pada APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024. Selain itu juga mengevaluasi Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan. Adapun Target Renja Tahun 2018 sampai 2023 dan Program Renstra Tahun 2023, Untuk Renja minimal tercapai 90 %, sedangkan Renstra minimal 60 %

2.1.1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Memperhatikan Tabel 2.1.1 “Rekafitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan yang Mencapai Target Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023” (Daftar Tabel 2.1.1.Terlampir), terdapat Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan yang diperkirakan tercapai target, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA hanya terealisasi sebesar 84,09 dari target 100%
2. Sedangkan pada PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) hanya terealisasi sebesar 86,52% dari target renja sebesar 100%

,

2.1.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.

Adapun penyebab-penyebab tidak tercapainya, terpenuhi target kinerja program / kegiatan sebagai berikut.

1. Terbatasnya anggaran APBD Kota Prabumulih sehingga terbatasnya pengalokasian dana pada kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan.
2. Terbatasnya SDM Dinas Perhubungan yang berasal dari lulusan sekolah perhubungan.
3. Belum menjadi prioritas RPJMD Kota Prabumulih.



2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu:

1. Kurang dapat mengimbangi perwujudan konsep Prabumulih sebagai Kota SMART CITY di Bidang Perhubungan khususnya yang menyangkut penggunaan aplikasi yang menggunakan basis internet.
2. Kurang dapat mengimbangi perwujudan konsep Prabumulih sebagai Kota Perdagangan dan Jasa khususnya penyediaan fasilitas perparkiran, terminal dan alat transportasi masal antar moda.
3. Kurangnya fasilitas rambu-rambu yang diperlukan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas.

2.1.4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pada point 2.1.4 adalah:

1. Adanya pengalokasian dana kegiatan di program-program yang menjadi ciri khas bidang Perhubungan.
2. Merekrut pegawai yang memang lulusan sekolah perhubungan.
3. Tidak adanya mutasi ke instansi lain khususnya SDM yang sudah dikirim mengikuti Bimtek Bidang Perhubungan dan juga SDM yang memang berasal dari Sekolah Perhubungan.



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Tabel 2.1.1 “Rekafitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan yang Tidak Mencapai Target Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023”
Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja langsung Tahun 2023

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi (Rp)		
			Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)
DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 6.758.300.391	100 %	Rp 6.404.632.561	83,03%
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.621.473.391	100 %	Rp.5.236.782.061	82,29%
DINAS PERHUBUNGAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.000.000	100 %	Rp 5.000.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.500.000	100 %	Rp 1.500.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.500.000	100 %	Rp 1.500.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.500.000	100 %	Rp 1.500.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan	Rp 1.500.000	100 %	Rp 1.500.000,00	100,00 %



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

GAN	Perubahan DPA- SKPD				
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.500.000	100 %	Rp 2.500.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.128.390.395	100 %	Rp 3.691.512.596,00	89,42%
DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 42.960.000	100 %	Rp 42.960.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.500.000	100 %	Rp 2.500.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Rp 2.500.000	100 %	Rp 2.500.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 34.080.000	100 %	Rp 34.080.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Administrasi Kepegawaian				



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

	Perangkat Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 112.000.000	100 %	Rp 111.755.000,00	99,78%
DINAS PERHUBUNGAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 20.000.000	100 %	Rp 16.512.000,00	82,56%
DINAS PERHUBUNGAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000	100 %	Rp 965.000,00	19,30%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 85.000.000	100 %	Rp 66.648.595,00	78,41%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 30.000.000	100 %	Rp 29.911.000,00	99,70%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 18.000.000	100 %	Rp 17.989.800,00	99,94%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 32.600.000	100 %	Rp 27.397.850,00	84,04%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 25.000.000	100 %	Rp 5.584.000,00	22,34%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Bahan/Material	Rp 25.000.000	100 %	Rp 25.000.000,00	100,00 %



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

DINAS PERHUBUNGAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 20.000.000	100 %	Rp 19.937.600,00	99,69%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 556.626.000	100 %	Rp 522.777.106,00	93,92%
DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 665.000.000	100 %	Rp 140.800.000,00	21,17%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.400.000	100 %	Rp 3.200.000,00	94,12%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 94.507.000	100 %	Rp 58.927.825,00	62,35%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 48.000.000	100 %	Rp 48.000.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp 360.010.000	100 %	Rp 318.148.089,00	88,37%



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

	Lapangan				
DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 30.000.000	100 %	Rp 29.961.600,00	99,87%
DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10.000.000	100 %	Rp 6.214.000,00	62,14%
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp1.349.827.000	100 %	Rp 1.167.850.500	86,52%
DINAS PERHUBUNGAN	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
DINAS PERHUBUNGAN	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	100 %	Rp 10.000.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
DINAS PERHUBUNGAN	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000	100 %	Rp 19.240.000,00	96,20%
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 70.000.000	100 %	Rp 57.395.900,00	81,99%



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

DINAS PERHUBUNGAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp 40.000.000	100 %	Rp 22.673.800,00	56,68%
DINAS PERHUBUNGAN	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
DINAS PERHUBUNGAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 70.000.000	100 %	Rp 31.000.000,00	44,29%
DINAS PERHUBUNGAN	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	100 %	Rp 50.000.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 582.947.000	100 %	Rp 522.263.800,00	89,59%
DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 100.000.000	100 %	Rp 67.700.000,00	67,70%



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
DINAS PERHUBUNGAN	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 145.000.000	100 %	Rp 145.000.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Rp 12.000.000	100 %	Rp 3.900.000,00	32,50%
DINAS PERHUBUNGAN	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	100 %	Rp 10.000.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				
DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rp 14.880.000	100 %	Rp 14.880.000,00	100,00 %
DINAS PERHUBUNGAN	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan				
DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Rp 10.000.000	100 %	Rp 10.000.000,00	100,00 %



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

	Perusahaan Angkutan Umum				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 215.000.000	100 %	Rp 203.797.000,00	94,79%
DINAS PERHUBUNGAN	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0%	Rp -	0%
DINAS PERHUBUNGAN	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0%	Rp -	0%



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Tabel 2.1.2

Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Tahun 2023-2024 dan Realisasi Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) TAHUN 2023	SATUAN ANGGARA N TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	PROGRAM/ KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/ OUTPUT) TAHUN 2024	SATUAN ANGGARA N TAHUN 2024	Target akhir Renstra a (2026)	Target dan Capaian tahunan Renstra Tahun 2018-2023			Target Tahunan Renstra Tahun 2024-2026
							TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIA N FISIK (%)	TARGET ANGGARAN 2024
Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp 7.713.900.395	Rp 6.404.632.561	83%	Rp6.060.390.395
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				Rp6.364.073.395	Rp 5.236.782.061	82%	Rp5.429.390.395
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan,penganggaran n dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	100%	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	100%	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100%	Rp 1.500.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	100%	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100%	Rp 1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	100%	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100%	Rp 1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	100%	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100%	Rp 1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	100%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	100%	Rp 2.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	100%	Rp 4.128.390.395	Rp 3.691.512.596	89%	Rp 4.128.390.395
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	100%	Rp 42.960.000	Rp 42.960.000	100%	Rp 42.960.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	100%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	100%	Rp 2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	100%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	100%	Rp 2.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	orang	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	orang	100%	Rp 34.080.000	Rp 34.080.000	100%	Rp 34.080.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stell	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stell	100%	Rp 112.000.000	Rp 111.755.000	100%	Rp 135.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	100%	Rp 20.000.000	Rp 16.512.000	83%	Rp 30.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100%	Rp 5.000.000	Rp 965.000	19%	Rp 10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100%	85.000.000	Rp 66.648.595	78%	Rp 55.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100%	Rp 30.000.000	Rp 29.911.000	100%	Rp 10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100%	Rp 18.000.000	Rp 17.989.800	100%	Rp 20.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100%	Rp 32.600.000	Rp 27.397.850	84%	Rp 15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	100%	Rp 25.000.000	Rp 5.584.000	22%	Rp 15.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	100%	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100%	Rp 20.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	100%	Rp 20.000.000	Rp 19.937.600	100%	Rp 15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100%	Rp 556.626.000	Rp 522.777.106	94%	Rp 300.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%				



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	100%	Rp 665.000.000	Rp 140.800.000	21%	Rp 5.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	100%				Rp 87.460.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	100%	Rp 3.400.000	Rp 3.200.000	94%	Rp 48.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 94.507.000	Rp 58.927.825	62%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	100%	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	100%	Rp 380.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	100%				Rp 40.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	100%	Rp 360.010.000	Rp 318.148.089	88%	Rp 20.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		100%	Rp 30.000.000	Rp 29.961.600	100%	Rp 631.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100%	Rp 10.000.000	Rp 6.214.000	62%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penetapan kebijakn dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	100%	Rp 1.349.827.000	Rp 1.167.850.500	87%	Rp 30.000.000
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%				
Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	100%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%	Rp 20.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	unit	100%				Rp 5.000.000
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	100%	Rp 20.000.000	Rp 19.240.000	96%	Rp 15.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	unit	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100%	Rp 70.000.000	Rp 57.395.900	82%	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	100%	Rp 40.000.000	Rp 22.673.800	57%	Rp 20.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100%				
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	100%	Rp 70.000.000	Rp 31.000.000	44%	Rp 20.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	100%	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%	Rp 9.000.000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	100%				Rp 90.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	Rp 582.947.000	Rp 522.263.800	90%	



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	100%	Rp 100.000.000	Rp 67.700.000	68%	Rp 12.000.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	100%				Rp 15.000.000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	100%	Rp 145.000.000	Rp 145.000.000	100%	Rp 170.000.000
Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		100%	Rp 12.000.000	Rp 3.900.000	33%	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	laporan	100%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%	Rp 30.000.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100%				



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	laporan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	100%	Rp 14.880.000	Rp 14.880.000	100%	Rp 20.000.000
Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%				
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	100%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%	Rp 150.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%				
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	100%	Rp 215.000.000	Rp 203.797.000	95%	Rp 5.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%				
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100%	Rp -	Rp -	0%	Rp 15.000.000
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100%				Rp 5.000.000



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih memaparkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator sasaran (Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran RKPD Kota Prabumulih.
- b. Apakah tingkat pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran RKPD Kota Prabumulih.

(Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan terlampir)

Memperhatikan Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari Aspek Pelayanan Umum dalam RPJMD
 - a. Ketersedian Rambu-Rambu Lalu Lintas (Trafic Light, warning Light, RPPJ, rambu-rambu, Trafic Block, Trafic Corn, Guadrill), Halte, Jembatan Penyeberangan pada Tahun 2021 hanya akan tercapai sebesar 23 % dari target sebesar 35 %.
 - b. Rasio Prasarana dan Fasilitas LLAJ siap pakai pada Tahun 2021 sebesar 60 % dari target Renstra 100%.
 - c. Rasio Izin Trayek pada Tahun 2021 sebesar 0.50 dari target Renstra pada tahun yang sama sebesar 0.50. Rasio ini merupakan patokan Dinas Perhubungan dalam mengeluarkan izin trayek untuk angkutan umum khususnya orang.
 - d. Jumlah Arus Angkutan Umum pada Tahun 2021 sebanyak 12 kali apabila ada partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah terhadap penyediaan jasa angkutan.
 - e. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum pada Tahun 2021 diperkirakan sebesar 5000 unit. Target ini dapat tercapai apabila Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Prabumulih lulus akreditasi.
2. Dari Aspek Pelayanan Umum dalam Renstra
3. Dari Aspek Bidang Perhubungan



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Tabel T-C 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PRABUMULIH

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian Pada Tahun Ke		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Aspek Pelayanan Umum												
1	Jumlah Terminal Bis (unit)	unit	2		2	2	2	2	2	2	1	1	1
2	Jumlah Uji KIR angkutan umum (unit)	unit	4000		3693	3843	4043	3500	3600	3650	0,95	0,94	0,90
3	Layanan Angkutan Darat (%)	%	0,5		0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,50	0,50	0,48
5	Pemasangan Rambu-rambu (%)	%	100		700	700	700	411	411	411	0,59	0,59	0,59
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Unit	62,50		62,50	62,50	62,50	20,50	21,43	21,43	0,3	0,3	0,3
											0,6855	0,6861	0,6771
B	BIDANG PERHUBUNGAN												
1	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dg SK Dirjend Perhubungan Darat	buah	12		9	9	9	0	0	0	0	0	0
2	Tersedianya Software SIM PKB sesuai dg SK Dirjend Perhubungan Darat	sistem	1		0	0	0	0	0	0	-	-	-



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

4	Tersedianya SDM di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	orang	15		15	15	15	13	13	13	0,9	0,9	0,9
5	Terpenuhinya Kartu Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor	%	100		100	100	100	100	100	100	1,0	1,0	1,0
5	Tersedianya SDM di Bidang Terminal	orang	20		20	20	20	29	29	29	1,5	1,5	1,5
6	Tersedianya SDM di Bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, dan Pengelolaan Parkir pada Kota.	orang	20		20	20	20	21	21	21	1,1	1,1	1,1
6	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	orang	1		1	1	1	1	1	1	1,0	1,0	1,0
											0,76667	0,76667	0,76667



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih :
 1. Pertumbuhan kendaraan dengan segala jenisnya yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur;
 2. Belum optimalnya Manajemen Transportasi/Kemacetan;
 3. Angkutan umum yang belum sepenuhnya mampu memperlancar aktivitas masyarakat dikarenakan kalah dengan moda lain;
 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pada peraturan di bidang perhubungan;
 5. Belum terealisasinya pengadaan terminal dalam kota yang representatif dan terminal terpadu;
 6. Belum optimalnya penataan lingkungan perkotaan;
 7. Belum optimalnya pelayanan Dinas Perhubungan , berkaitan dengan pelayanan penyediaan sarana prasarana transportasi dan pelayanan perhubungan lainnya;
 8. Kualitas aparatur Dinas Perhubungan yang masih perlu ditingkatkan, baik jumlah maupun kompetensinya.
2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan.
 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra
 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD
 3. Bersifat mendesak dan penting serta mendasar
 4. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik
 5. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
 6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
 7. Prioritas dan janji politik yang harus diwujudkan



2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

TABEL 2.4.1

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA PRABUMULIH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				sangat diperlukan
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub	Adanya kegiatan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Tahun	Sangat diperlukan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 tahun	sangat diperlukan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 tahun	sangat diperlukan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dishub	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 tahun	sangat diperlukan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dishub	Terpeliharanya kantor terminal	1 Tahun	sangat diperlukan
Pengelolaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Dishub	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Tahun	sangat diperlukan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	Dishub	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	8 unit	sangat diperlukan



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Tahun	sangat diperlukan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Terkendalinya Lalu Lintas Kendaraan Pada hari-hari raya Besar	2 Keg	sangat diperlukan
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Dishub	Adanya giat Razia dalam rangka penertiban lalu lintas	1 laporan	sangat diperlukan
	Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Dishub	Adanya Forum Lalu Lintas	1 Dok	sangat diperlukan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dishub	Terpenuhinya Wahana Tata Nugraha	1 keg	sangat diperlukan
Audit dan inpeksi keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dishub	Adanya Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	sangat diperlukan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Terpenuhinya Penyediaan Pelayana Angkutan Untuk Jasa Angkutan Orang	1 keg	sangat diperlukan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Terpenuhinya Penyusunan Kegiatan Kelayakan Sarana Transfortasi Guna Keselamatan Penumpang	1 keg	sangat diperlukan
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	1 Dok	sangat diperlukan



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	sangat diperlukan

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Khusus untuk Kota Prabumulih merupakan pemangku yang sangat strategis. Perumusan Program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam pembangunan Daerah .

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan PD menurut rancangan RKPD.

2.5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Tabel 2.4 mereview atas program/kegiatan dan pagu yang diindikasikan dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, sekaligus juga membandingkan indikasi pagu dengan analisis kebutuhan. Catatan penting terkait perbandingan dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam kolom catatan. Adapun alokasi pagu secara keseluruhan untuk Dinas Perhubungan Kota Prabumulih tetap sesuai antara RENJA dengan RKPD.



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

Lampiran II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 050 / /DISHUB/2024
TANGGAL : Februari 2024

Tabel 2.5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2026
KOTA PRABUMULIH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode th Anggaran 2025-2026	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Dana Pagu	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
2	3	4	6	6	8	8
DINAS PERHUBUNGAN					Rp 6.542.217.395	Rp 6.102.217.395
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				Rp 5.927.337.395	Rp 5.477.337.395
X.XX.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	2 Dok	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
X.XX.01.2.01.0002		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dok	1 Dok	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.01.0003		Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
X.XX.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
X.XX.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
X.XX.01.2.01.0006		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
X.XX.01.2.02.0001	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	648 Orang	648 Orang	Rp 4.128.390.395	Rp 4.128.390.395
X.XX.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 42.960.000	Rp 42.960.000
X.XX.01.2.02.0005		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
X.XX.01.2.02.0006		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
X.XX.01.2.03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 34.080.000	Rp 34.080.000
X.XX.01.2.05.0002	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	265 Paket	265 Paket	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.05.0009		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 Orang	4 Orang	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
X.XX.01.2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Paket	4 Paket	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
X.XX.01.2.06.0002		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	4 Paket	Rp 100.000.000	Rp 120.000.000
X.XX.01.2.06.0003		Penyediaan peralatan rumah tangga	4 Paket	4 Paket	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
X.XX.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
X.XX.01.2.06.0005		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	4 Paket	4 Paket	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
X.XX.01.2.06.0006		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dok	2 Dok	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
X.XX.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	4 Paket	4 Paket	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
X.XX.01.2.06.0008		Fasilitas kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
X.XX.01.2.06.0009		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Rp 350.000.000	Rp 400.000.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-	Rp 520.000.000	-
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	340 Buah	340 Buah	Rp 3.400.000	Rp 3.400.000
X.XX.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Laporan	2 Laporan	Rp 94.507.000	Rp 94.507.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.08.0004		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8 Orang	8 Orang	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000
X.XX.01.2.09.0002		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	22 Unit	22 Unit	Rp 280.000.000	Rp 280.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
X.XX.01.2.09.0010		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	9 Unit	9 Unit	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp 614.880.000	Rp 624.880.000
2.15.02.2.01.0002	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2.15.02.2.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50 Unit	50 Unit	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
2.15.02.2.02.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasana jalan	24 Unit	24 Unit	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

2.15.02.2.03.0007	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2 Unit	2 Unit	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
2.15.02.2.04.0002	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000
2.15.02.2.05.0001	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	3 Unit	3 Unit	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
2.15.02.2.05.0007		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	9 Unit	9 Unit	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
2.15.02.2.06.0001	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
2.15.02.2.06.0015		Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

2.15.02.2.07.0006	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	1 Laporan	1 Laporan	Rp 14.880.000	Rp 14.880.000
2.15.02.2.08.0007	Audit dan Inpeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inpeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalm 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 Unit	2 Unit	Rp 170.000.000	Rp 170.000.000
2.15.02.2.11.0002	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalm 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalm 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
2.15.02.2.13.0001	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

2.15.02.2.13.0002	Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
-------------------	----------------	--	-------	-------	------------------	------------------



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sub bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, sehingga telaahan difokuskan pada telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan.

1. *Lingkungan Strategis Global*

Menelaah kependudukan dan urbanisasi, jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat 4 terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Implikasi dari jumlah penduduk yang bertambah pesat ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten/kota, bahkan antar desa menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada.

Negara Indonesia beserta 5 negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand, Korea, Jepang) diprediksi akan menyumbang 91% dari perekonomian Asia di Tahun 2050, seiring pergeseran perekonomian dunia ke Asia hingga 52%. Walaupun saat ini ekonomi tumbuh positif, namun masih lebih banyak ditopang oleh konsumsi di banding investasi dan ekspor, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan Kota Prabumulih seraya memperhatikan Visi Walikota Prabumulih 2024-2026 **"MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK"** harapan yang ingin dicapai Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Meningkatnya Pelayanan Publik.

Tabel 3.1.1

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Kota Prabumulih
Tahun 2013 – 2017**

NO	SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.46	2.46	1.38	2.56	0.16
2	Pertambangan dan Penggalian	-14.44	65.17	1.31	6.64	4.00
3	Industri Pengolahan	4.66	6.68	6.95	8.46	10.20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.50	25.04	6.00	8.44	7.45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.81	18.46	9.36	3.99	6.96
6	Bangunan	8.84	6.24	1.30	14.20	5.43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	7.76	6.19	4.42	5.83	4.85
8	Transoportasi dan Pergudangan	7.15	8.10	9.89	9.73	9.21
9	Penyediaan, Akomondasi dan Makan-Minum	6.48	4.96	8.58	11.84	12.99
10	Informasi dan Komunikasi	5.54	8.82	10.16	6.96	8.43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.93	4.73	6.28	2.03	3.67
12	Real Estate	8.59	8.00	0.20	6.71	8.29
13	Jasa Perusahaan	7.97	7.80	5.09	8.09	5.39
14	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.36	3.78	9.56	0.29	1.84
15	Jasa Pendidikan	6.86	18.97	9.63	2.88	2.10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.20	8.21	10.83	-1.48	4.32
17	Jasa Lainnya	2.40	1.26	4.67	0.87	3.48
PDRB Dengan Migas		5.07	11.51	4.84	6.81	5.27
PDRB Tanpa Migas		7.47	6.55	5.41	6.84	

terlihat bahwa pada Tahun 2017 sektor paling dominan di Kota Prabumulih secara urutan dari yang tertinggi adalah:

- Penyediaan, akomodasi dan makan minum ($\pm 12,99\%$).
- Industri Pengolahan ($\pm 10,20\%$).
- Transfortasi dan Pengudangan ($\pm 9,21\%$).
- Informasi dan komunikasi ($\pm 8,43\%$).
- Real Estate ($\pm 8,29\%$).

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya, Pemerintah Kota Prabumulih harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan Penyediaan, akomodasi dan makan minum, Kegiatan industri pengolahan, dan Kegiatan Tranfortasi dan Pengudangan serta Real Estate.

2. *Lingkungan Strategis Transportasi*

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk G-20 dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim ‘bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) sebesar 26% pada tahun 2021 dari tingkat BAU (*business as usual*) dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional’, Pemerintah Indonesia mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. Sektor transportasi pada Tahun 2012 diperhitungkan menyumbang sekitar 60%-70% emisi GRK Nasional (Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup), yang artinya masalah transportasi menjadi salah satu komponen utama yang perlu ditangani, karena kontribusinya luar biasa besar terhadap masalah-masalah perubahan iklim global.

3. *Intelligent Transport System (ITS)*

ITS atau Sistem Transportasi Cerdas adalah pengembangan teknologi transportasi berupa sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi di mana pengumpulan data primer diolah sedemikian rupa, sehingga hasil olahan tersebut dapat diakses oleh pengguna jalan dalam bentuk informasi berteknologi. Pengembangan ITS pada dasarnya ditujukan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan ITS diharapkan operasional prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan.

4. *Angkutan Umum Massal*

Permasalahan transportasi jalan yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain:

- a. Belum memadainya pelayanan angkutan umum secara kualitas

(catatan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih: secara kuantitas pun tidak memadai lagi. Hal ini disebabkan angkutan umum kalah bersaing dengan angkutan seperti ojek)

- b. Peningkatan pencemaran udara

(catatan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih: dikarenakan semakin meningkatnya

penggunaan kendaraan bermotor, tingginya volume lalu lintas, semakin panjangnya travel time, modal share angkutan umum masih sangat rendah serta kondisi kendaraan yang sudah tidak layak beroperasi lagi).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 3 Pilar Kebijakan, yaitu:

- a. Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas).
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).
- c. Penurunan Polusi Udara dan Suara.

Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 3 pilar tersebut adalah penerapan sistem Angkutan Umum Massal. Indonesia dipandang sangat perlu untuk mengembangkan implementasi sistem angkutan umum massal karena dengan memprioritaskan angkutan umum sebagai alat transportasi utama, dengan integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya, sistem ini dapat menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.

5. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Permasalahan terkait aspek keselamatan dan keamanan transportasi yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain :

- a. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan Transportasi secara terintegrasi.
- b. Minimnya kesadaran masyarakat akan dan peran sertanya dalam 'keselamatan dan Keamanan transportasi'.
- c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi (disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta tingginya toleransi terhadap pelanggaran).
- d. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
- e. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, di antaranya dikarenakan dominasi pengguna sepeda motor di jalan.
- f. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk analisa dan

peningkatan keselamatan jalan.

- g. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai UU 23/2009 tentang Perkeretaapian. Pada dasarnya perlintasan jalur KA dengan jalan diarahkan menjadi tidak sebidang, dengan pertimbangan keselamatan serta untuk meminimalisir hambatan lalu lintas jalan. Namun pada keadaan tertentu (seperti pada perlintasan sebidang yang telah terbangun sebelum terbitnya UU dimaksud), perlintasan sebidang dapat ditangani melalui upaya penutupan perlintasan, yang mana kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan pengelola jalan. Namun pun demikian, kendala yang kerap dirasakan adalah terkait dengan masalah pendanaan/penganggaran. Berdasar keterangan Direktur Jenderal Perkeretaapian, bahwa satuan harga pintu perlintasan relatif tinggi, harga satu pintu *single* Rp 1,6 Milyar sementara yang *double* Rp 2 Milyar (Desfika,2015).

6. Indikator Kinerja Utama

Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan menargetkan bahwa 'pembangunan transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pembangunan transportasi ditujukan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air.
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif.
- **Nilai Tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan,

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Presiden (NAWACITA), Kementerian Perhubungan menetapkan 3 aspek utama yang menjadi tujuan pembangunan transportasi dalam RENSTRA 2018–2023. Berikut ini adalah uraian ketiga aspek dimaksud dan sarasannya, disertai indikator dan kegiatan strategis yang dipertimbangkan bertautan erat dengan isu strategis di .

Tujuan 1 : Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Sasaran :

- a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
Indikator : jumlah sarana dan prasarana keselamatan.
Kegiatan Strategis : jumlah perlengkapan jalan terpasang (m^2 marka, unit rambu, unit APILL, m^1 guardrail).
- b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

Tujuan 2 : Pelayanan Transportasi.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
Indikator : jumlah SDM transportasi bersertifikat.
- c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance.
Indikator : Nilai SAKIP.
Kegiatan Strategis : E-Performance.
- e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
Indikator : Jumlah emisi GRK dari sektor transportasi yang dapat diturunkan.
Kegiatan Strategis : smart driving, pengadaan bus BRT, pembangunan trotoar/fasilitas integrasi moda dan jalur sepeda, ATCS, andalalin.
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *cleangovernance*.



Tujuan 3: Kapasitas Transportasi

Sasaran:

- a. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda.
- b. Meningkatkan produksi angkutan penumpang dan barang.
- c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.

- 1) **Indikator** : peningkatan kapasitas prasarana.
Kegiatan Strategis : pembangunan/rehabilitasi terminal, pengembangan rute angkutan.
- 2) **Indikator** : peningkatan kapasitas sarana.
Kegiatan Strategis : pengadaan bus BRT.
- 3) **Indikator** : jumlah lintasan/rute angkutan perintis.
Kegiatan Strategis : subsidi operasional angkutan perintis.
- 4) **Indikator** : jumlah lintasan/rute angkutan perintis yang menjadi komersil.
Kegiatan Strategis : monitoring kinerja.

- d. Meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan.

Indikator : rasiomodal share angkutan umum perkotaan BRT (pangsa pasar) digunakan terhadap jumlah angkutan umum.

Kegiatan Strategis : pengadaan bus BRT.

- e. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Indikator : jumlah kota yang menerapkan ATCS.

Kegiatan Strategis : pengadaan dan pemasangan ATCS di kota metropolitan.



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perhubungan Kota Prabumulih untuk Tahun 2025, selain dibuat dengan merujuk Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2024–2026,

3.2.1 TUJUAN

Tujuan Renja adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2024-2026 yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih adalah:

1. Meningkatnya pelayanan publik
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

3.2.2 SASARAN

Sasaran Renja adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah:

1. Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik":
 - 1) Sasaran ke-1 "Meningkatnya Maturitas SPIP Kota Prabumulih"
 - Indikator Kinerja "Nilai SPIP Kota Prabumulih"
 - 2) Sasaran ke-2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"
 - Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi LAKIP Inspektorat"



3) Sasaran ke-3 “Meningkatnya nilai Indeks Pelayanan Masyarakat”

- Indikator Kinerja “Survey Kepuasan Masyarakat”

Rumusan, Tujuan dan sasaran Program RPD Dinas Perhubungan Kota Prabumulih adalah:

1) Program ke-1 “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “

- Indikator Ke-1 “Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja”

- Indikator Ke-2 “Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”

2) Program ke-2 “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).”

- Indikator Ke-1 “Persentase Juru Parkir Yang Memiliki Izin”

- Indikator Ke-2 “Persentase Kepemilikan KIR Terhadap Rencana KIR Angkutan Darat”

- Indikator Ke-3 “Persentase Layanan Angkutan Darat”

- Indikator Ke-4 “Persentase Sarana Prasarana Rambu Lalu Lintas yang Terpenuhi”



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

TABEL 3.2.2.1

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PRABUMULIH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik		Indeksi Kepuasan Masyarakat			
		Meningkatnya nilai Indeks Pelayanan Masyarakat	Persentase Juru Parkir yang Memiliki Izin	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan KIR Terhadap Rencana KIR Angkutan Darat	100%	100%	100%
			Persentase Layanan Angkutan Darat	100%	100%	100%
			Persentase Sarana Prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpenuhi	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Level Matiritas			
			Nilai Sakip OPD			
		Meningkatnya Maturitas SPIP Kota Prabumulih	Nilai SPIP Kota Prabumulih	3,1	3,2	3,3
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi LAKIP Inspektorat	B	B	BB



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FAKTOR BAHAN PERTIMBANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
X.XX.01.2.0 1.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 1.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 1.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 1.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 1.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 1.0006		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 2.0001	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.0 2.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 2.0005		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 2.0006		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 3.0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 5.0002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 5.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0002		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0003		Penyediaan peralatan rumah tangga	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.0 6.0005		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0006		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0007		Penyediaan Bahan/Material	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0008		Fasilitas kunjungan tamu	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 6.0009		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2. 07.0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 8.0001		Penyediaan jasa surat menyurat	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 8.0004		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.0 9.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak,	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemerintahan yang Baik”
X.XX.01.2.0 9.0009		Pemeliharaan/rehabili tasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”
X.XX.01.2.0 9.0010		Pemeliharaan/rehabili tasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
2.15.02.2.0 1.0002	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”
2.15.02.2.0 2.0001		Pembangunan Prasana Jalan di Jalan Kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”
2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”
2.15.02.2.0 2.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”
2.15.02.2.0 3.0007	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”
2.15.02.2.0 4.0002	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

		Kabupaten/Kota	
2.15.02.2.0 5.0001	Pengujian Berkala	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.0 5.0007	Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.0 6.0001	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.0 6.0004		Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.0 6.0015		Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.0 7.0006	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.0 8.0007	Audit dan infeksi keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan inpeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.0 9.0003	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalm 1	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

	(satu) daerah kabupaten/kota		
2.15.02.2.1 1.0002	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.1 3.0001	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.1 3.0002	Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



3.3.2 URAIAN GARIS BESAR MENGENAI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025, terdiri dari **2 (Dua) Program** dan Kegiatan sebanyak **18 Kegiatan** dan **45 Sub Kegiatan** dengan **pagu indikatif dana Rp. 6.542.217.395,- (Enam Miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)** dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari **8 Kegiatan** dan **30 Sub Kegiatan**, dengan pagu dana indikatif sebesar **Rp. 5.927.337.395,- (Lima Miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)**
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari **10 Kegiatan** dan **15 Sub Kegiatan**, dengan pagu dana indikatif sebesar **Rp. 614.880.000,- (Enam ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)**



3.3.3 TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kegiatan dalam mencapai sasaran dalam RPJMD.

Tabel 3.3.2 merupakan Tabel Rencana Program dan Kegiatan (terlampir)

TABEL 3.3.3.1

**PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	PROGRAM	KEGIATAN	FAKTOR BAHAN PERTIMBANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
X.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2.15.02.2.01		Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.02		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.07	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.08	Audit dan Inpeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.09	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalm 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

2.15.02.2.11		Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"
2.15.02.2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencapaian Visi dan Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
X	DINAS PERHUBUNGAN				Rp 6.542.217.395
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				Rp 5.927.337.395
X.XX.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	APBD	2 Dok	Rp 2.500.000
X.XX.01.2.01.0002		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	APBD	1 Dok	Rp 1.500.000
X.XX.01.2.01.0003		Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA- SKPD	APBD	1 Dok	Rp 1.500.000
X.XX.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD	1 Dok	Rp 1.500.000
X.XX.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	APBD	1 Dok	Rp 1.500.000
X.XX.01.2.01.0006		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	APBD	1 Laporan	Rp 2.500.000
X.XX.01.2.02.0001	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	APBD	648 Orang	Rp 4.128.390.395
X.XX.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	APBD	2 Dokumen	Rp 42.960.000
X.XX.01.2.02.0005		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	APBD	1 Laporan	Rp 2.500.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.02.0006		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	APBD	1 Laporan	Rp 2.500.000
X.XX.01.2.03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	APBD	1 Laporan	Rp 34.080.000
X.XX.01.2.05.0002	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	APBD	265 Paket	Rp 112.000.000
X.XX.01.2.05.0009		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	APBD	4 Orang	Rp 20.000.000
X.XX.01.2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	APBD	4 Paket	Rp 5.000.000
X.XX.01.2.06.0002		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	APBD	4 Paket	Rp 100.000.000
X.XX.01.2.06.0003		Penyediaan peralatan rumah tangga	APBD	4 Paket	Rp 30.000.000
X.XX.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	4 Paket	Rp 18.000.000
X.XX.01.2.06.0005		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	APBD	4 Paket	Rp 15.000.000
X.XX.01.2.06.0006		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	APBD	2 Dok	Rp 25.000.000
X.XX.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	APBD	4 Paket	Rp 25.000.000
X.XX.01.2.06.0008		Fasilitas kunjungan tamu	APBD	4 Laporan	Rp 20.000.000
X.XX.01.2.06.0009		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	APBD	4 Laporan	Rp 350.000.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	1 Unit	Rp 520.000.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	APBD	340 Buah	Rp 3.400.000
X.XX.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	APBD	2 Laporan	Rp 94.507.000
X.XX.01.2.08.0004		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	APBD	8 Orang	Rp 48.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

X.XX.01.2.09.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	APBD	22 Unit	Rp 280.000.000
X.XX.01.2.09.0009		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	APBD	2 Unit	Rp 30.000.000
X.XX.01.2.09.0010		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	APBD	9 Unit	Rp 10.000.000
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp614.880.000
2.15.02.2.01.0002	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	APBD	1 Dok	Rp 10.000.000
2.15.02.2.02.0001	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	APBD	10 Unit	Rp 20.000.000
2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	APBD	50 Unit	Rp 50.000.000
2.15.02.2.02.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasana jalan	APBD	24 Unit	Rp 40.000.000
2.15.02.2.03.0007	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	APBD	2 Unit	Rp 20.000.000
2.15.02.2.04.0002	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	1 Laporan	Rp 30.000.000
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	APBD	3 Unit	Rp 25.000.000
2.15.02.2.05.0007		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	APBD	9 Unit	Rp 100.000.000
2.15.02.2.06.0001	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	APBD	2 Laporan	Rp 60.000.000
2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	APBD	1 Laporan	Rp 12.000.000
2.15.02.2.06.0015		Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	APBD	1 Laporan	Rp 10.000.000



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

2.15.02.2.07.0006	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	APBD	1 Laporan	Rp 14.880.000
2.15.02.2.08.0007	Audit dan Inpeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	APBD	1 Laporan	Rp 8.000.000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	APBD	2 Unit	Rp 170.000.000
2.15.02.2.11.0002	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	APBD	1 Kegiatan	Rp 15.000.000
2.15.02.2.13.0001	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	1 Dok	Rp 15.000.000
2.15.02.2.13.0002	Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	1 Dok	Rp 15.000.000

BAB V

P E N U T U P

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rancangan (Renja) Dinas Perhubungan, Kota Prabumulih Tahun 2025 ini dapat disusun. Rancangan (Renja) ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dalam tahun 2025, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rancangan (Renja) ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rancangan (Renja) Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, serta dukungan dana yang tersedia, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka membangun di bidang perhubungan.

Prabumulih, Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Prabumulih,



Drs. AMILTON
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 196610051995031003